



PEMKAB PPU APRESIASI LOMBA BALAP KAPAL JENEBORA



TERIMA AUDIENSI KWARDA GERAKAN
PRAMUKA KALTIM, PJ BUPATI PPU
DORONG PERAN PEMBANGUNAN IKN



Pembukaan Lomba Balap Kapal Dompeng 2023 di Kelurahan Jenebora, Minggu (22/10/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU APRESIASI LOMBA BALAP KAPAL JENEBOA

PPU - Kelurahan Jenebora, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Lomba Balap Kapal Dompeng 2023. Pemkab PPU mengapresiasi tergelarnya kegiatan yang sudah dua kali diadakan tersebut.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU Ahmad Usman membuka secara resmi perlombaan yang digelar di Dermaga Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Minggu, (22/10/2023). Atas nama Pemkab PPU, ia menyampaikan sambutan serta penghargaan tinggi pada segenap panitia penyelenggara.

"Kami merasa bangga karena kegiatan balapan kapal dompeng ini untuk yang kedua kalinya dilaksanakan di tempat ini. Selamat pada panitia, yang telah berupaya dan bekerja keras, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan meriah," ujarnya.

Usman berharap, kegiatan ini bisa rutin digelar tiap tahunnya. Kemudian juga dapat menjadi ikon yang dapat dibanggakan daerah.

"Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang bukan hanya pelaksanaan balapan kapal dompeng saja yang bisa diselenggarakan, tetapi acara besar lainnya juga bisa kita selenggarakan di daerah ini," katanya.

Lanjutnya, pelaksanaan acara ini tentunya searah dengan geliatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai daerah penyangga Nusantara yang sedang giat memba-

ngun.

"Untuk itu mari kita dukung dengan menunjukkan kemampuan untuk bisa terlibat dalam membangun IKN sesuai dengan profesi masing-masing," tutur Usman.

Ia juga minta agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk IKN dan jangan hanya menjadi penonton. Masyarakat Kabupaten PPU harus berpendidikan, unggul, berkualitas, cerdas, kreatif, berdaya saing tinggi, berakhlak mulia, serta berwawasan luas.

"Pemerintah Kabupaten PPU pasti memberi peluang dan kesempatan yang sama pada semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan IKN," lanjutnya.

Sementara itu Lurah Jenebora Syaryadi menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat Jenebora. Terkhusus untuk panitia, sponsor dan peserta yang telah mendukung kegiatan tersebut.

Ia juga berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat dan pengalaman berharga bagi semua khususnya masyarakat Jenebora. "Mari Kita nikmati acara ini dengan penuh semangat dan antusias. Selamat berlomba jaga sportivitas karena Kita semua bersaudara. Mari Kita dukung nelayan untuk maju dan sejahtera, hidup nelayan, hidup nelayan, hidup nelayan," tutur Syaryadi memberikan semangat warganya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat mendiskusikan beberapa hal bersama dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Minggu malam (22/10/2023). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

MALAM RAMAH TAMAH PJ GUBERNUR KALTIM DI PPU, MAKMUR DISKUSIKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar malam ramah tamah untuk Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Minggu malam, (22/10/2023). Dalam kesempatan itu, Pj Bupati PPU Makmur Marbun mendiskusikan terkait percepatan pembangunan di daerah.

Setelah siang Makmur memamerkan potensi wisata pantai di PPU dengan bermain jetski, acara yang digelar di Pantai Istana Amal Penajam, berlanjut hingga malam hari. Yaitu menjamu Akmal Malik beserta jajarannya dalam makan malam sekaligus ramah tamah.

Dalam malam yang penuh keakraban itu, turut dimeriahkan oleh penampilan eksklusif dari band akustik 2B yang berasal dari Kota Balikpapan. Dalam momentum itu pula, baik Makmur dan Akmal serta undangan yang hadir turut serta menyumbangkan lagu.

"Pantai Istana Amal yang indah menjadi

latar belakang yang sempurna untuk acara ramah tamah dan makan malam ini," ujar Makmur.

Turut pula hadir dalam kegiatan itu, Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan, Komandan Kodim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi. Serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Di sela-sela jamuan itu pula, Makmur sempat membuka diskusi terkait percepatan pembangunan di PPU. Yang semua itu berhubungan langsung dengan persiapan daerah dalam menyambut dan mendukung pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Segala hal yang diperlukan dalam percepatan pembangunan di PPU, sebagai daerah pendukung IKN. Agar nantinya, daerah dan warga PPU tidak hanya jadi penonton saja," tutup Makmur. **(ADV/SBK)**



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menyerahkan penghargaan ke siswa berprestasi di ajang Nasional, Senin (23/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

SERAHKAN PENGHARGAAN KE SISWA DAN SEKOLAH BERPRESTASI, PJ BUPATI PPU BANGUN KEPERCAYAAN DIRI BANGUN DAERAH MAJU

PPU - Siswa dan sekolah berprestasi di Pe-najam Paser Utara (PPU) mendapatkan penghargaan khusus dari Pemkab PPU. Dalam kesempatan itu, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun turut memberikan pesan semangat dan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Didampingi istrinya, yaitu Ketua TP-PKK PPU, Linda Romauli Siregar ia menyerahkan sejumlah penghargaan pada para pemenang lomba tingkat Nasional dalam program Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) PPU. Dilaksanakan usai apel pagi di lingkungan Setkab PPU, Senin, (23/10/2023).

Di antaranya adalah Piagam penghargaan kepada juara 1 kategori lomba bermain sambil bernyanyi pada pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat nasional ke 10, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) PPU. Ada juga penghargaan diberikan kepada SDN 013 sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 dan penghargaan kepada SDN 016, SPN 5 PPU, SMAN 5 PPU sebagai sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional 2023.

Adapun Makmur menuturkan PPU memili-

ki potensi yang besar untuk menjadi kabupaten yang maju di Kaltim. Banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan lebih jauh.

"Bapak ibu, Kita harus percaya diri karena ini tempat Kita. Kita bisa berbuat sesuatu untuk wilayah Kita ini. Jangan sampai menjadi penonton di daerah sendiri," katanya.

Bahkan, jika dibangun dengan sungguh-sungguh, ia memperkirakan ke depan PPU bisa mengalahkan Kota Balikpapan. Asal potensi di daerah ini dapat dikelola dengan baik.

"Ibarat sapu lidi, jika hanya satu lidi tidak ada gunanya, tetapi jika lidi bersatu pastilah luar bisa kuatnya. Ayo semua saling support. Kalau ada yang ingin maju ayo kita support, karena dengan itu kita telah memberikan kekuatan ke mereka," untkapnya.

Oleh karena itu, dirinya minta kepada seluruh perangkat daerah di Pemkab PPU agar saling menjalin kerja sama yang baik untuk kemajuan PPU. "Ya, mungkin jika biasanya berjalan sedikit lambat, mulai saat ini langkah Kita bisa dipercepat untuk kemajuan daerah kita PPU," pungkas Makmur. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membacakan keterangan tertulis Menteri Agama dalam upacara HSN di Kantor Kemenag PPU, Minggu (22/10/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PJ BUPATI PPU PIMPIN UPACARA HSN DI KANTOR KEMENAG PPU

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) turut memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2023 Minggu, (22/10/2023). Dalam peringatan tiap 22 Oktober itu, Pj Bupati PPU Makmur Marbun memimpin upacara peringatan bertempat di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten PPU.

Pelaksanaan peringatan HSN tersebut berlangsung secara khidmat, baik oleh Makmur dan juga para santri di seluruh PPU. Turut hadir dalam HSN 2023, jajaran Pemkab PPU, Polres PPU dan pejabat Kementerian Agama PPU serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyampaian, Makmur membacakan sambutan tertulis atas nama Menteri Agama Yaqud Cholil Qoumas. Bahwa sejak ditetapkan pada 2015, peringatan HSN dengan tema berbeda selalu digelar pada setiap tahunnya selalu rutin.

Untuk 2023 ini, peringatan HSN mengangkat Tema "Jihad Santri Jayakan Negeri" dimana tema ini memiliki makna yang mendalam. "Jihad dalam Islam bukanlah se-

batas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan, yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu, dan memperbaiki diri," ungkapnya.

Melalui peringatan HSN ini, bangsa Indonesia patut merenungkan peran santri. Baik sebagai pilar keagamaan dan keilmuan serta menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.

"Sebagai santri, kita tidak hanya berkewajiban memahami ajaran agama dengan baik, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari," sambungnya.

Lebih lanjut, Makmur menearangkan santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan.

Ia juga menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. HSN adalah milik semua kalangan, milik semua komponen bangsa yang

mencintai tanah air.

Milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, semua elemen masyarakat apapun latar belakangnya, sudah sepatutnya untuk turut serta ikut merayakan HSN.

Momentum HSN juga waktu yang tepat melakukan refleksi atau muhasabah. Dengan cara napak tilas perjuangan para santri dan kelompok Pesantren dalam menjaga martabat bangsa Indonesia.

"Hari Santri adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan peran kita dalam menjayakan negeri ini. Tentunya sebagai generasi penerus, kita harus terus belajar dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Kita harus menjadi insan yang cerdas, peduli terhadap sesama, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Mari kita renungkan dan amalkan semangat jihad santri dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya. (ADV/SBK)z



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat berbincang dengan Wakil Ketua Kwarda Bidang Organisasi dan Hukum (Orgakum) Suharno. (Robbi/MediaKaltimGroup)

TERIMA AUDIENSI KWARDA GERAKAN PRAMUKA KALTIM, PJ BUPATI PPU DORONG PERAN PEMBANGUNAN IKN

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mendukung setiap agenda Pramuka yang ada di wilayahnya. Ia berharap, dari setiap kegiatan itu dalam memberikan dampak positif terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kaltim. Pertemuan bertempat di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Minggu (22/10/23).

Dalam kunjungan itu, Kwarda Gerakan Pramuka Kaltim menyampaikan adanya agenda Kegiatan Kemah Dewan Satuan Karya se-kalimantan timur (KDS). Rencananya kegiatan itu diselenggara di Buper Benuo Taka, Kecamatan Babulu.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Kwarda Bidang Organisasi dan Hukum (Orgakum) Suharno meminta kesediaan Pj Bupati Marbun untuk Membuka Acara KDS tersebut. "Kami berharap Pak PJ Bupati bisa membuka acara tersebut yang diselenggarakan di Babulu," katanya.

Mengikuti itu, Makmur menyambut baik adanya kunjungan tersebut. Ia berharap agar Kwarda Gerakan Pramuka Kaltim turut men-

gawal perkembangan anak muda sebagai generasi bangsa.

"Terima kasih sudah mau silaturahmi dan saya siap menerima apapun masukan dan saran," ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta lewat adanya kegiatan itu nantinya mampu memberikan kontribusi terhadap anak muda PPU. Utamanya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal.

"Sehingga setiap agenda penting dapat terkomunikasikan dengan baik. Saya juga berharap, melalui kegiatan Pramuka, SDM yang ada di PPU semakin meningkat, semakin unggul," lanjut Makmur.

Terlebih juga sejalan dengan program pemerintah daerah dalam menyongsong pemindahan IKN. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin masyarakat dapat berperan dalam agenda pemerintah pusat tersebut.

"Apalagi dengan adanya pembangunan mega proyek IKN. Saya hanya ingin melihat putra-putri daerah PPU ini menjadi generasi berprestasi pungkasnya. (ADV/SBK)



KUKAR KAYA FESTIVAL DIPASATIKAN BERLANJUT TAHUN DEPAN



**SAFARUDDIN SAMBANGI KUKAR, BUPATI
PAPARKAN KONDISI KUKAR DAN STRATEGI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN**



Wabup Kukar, Rendi Solihin di acara KukarLand Festival 2023 lalu. (Ady/Radar Kukar)

KUKAR KAYA FESTIVAL DIPASATIKAN BERLANJUT TAHUN DEPAN

TENGARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, pastikan program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) berlangsung kembali ditahun depan. Hal ini disampaikan Rendi, saat ia menyampaikan sambutannya pada acara Festival Seni Budaya Nusantara, di Kecamatan Muara Badak, Minggu (22/10/2023) malam.

"Insya Allah Kukar Kaya Festival akan kita laksanakan sampai akhir 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. Kita pastikan semua gratis untuk masyarakat Kukar," ucap Rendi lanjut.

"Tahun depan kita akan kembali ke sini (Muara Badak), karena komunitasnya banyak yang keren, talenta pemuda Muara Badak juga banyak yang keren. Tahun depan kita laksanakan lebih meriah," begitu sambungnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menetapkan sekitar 81 kegiatan, kedalam Kalender Event 2023. Serentetan event tersebut akan digelar secara bergantian di 20 Kecamatan di Kukar.

Rendi mengungkapkan, digelarnya serangkaian event ini bukan hanya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Tapi juga untuk melestarikan kesenian dan budaya di Kukar. Juga diharapkan mampu membawa dampak pada peningkatan pere-

konomian masyarakat di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Untuk menyukseskan pelaksanaan event ini, kami melibatkan banyak pihak, termasuk Komite Ekonomi Kreatif (Kekraf), dunia usaha, pelaku UMKM, serta pelaku seni dan budaya daerah," ujarnya.

Program Kalender Event merupakan bagian dari realisasi program dedikasi Kukar Idaman. Yaitu program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) dan Kutai Kartanegara Kreatif Idaman.

Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kukar periode 2021-2026. Dalam kurun waktu lima tahun akan ada 100 festival dan event yang diselenggarakan.

Hadirnya festival ini juga sejalan dengan target Pemkab Kukar, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Efek domino dari festival tersebut akan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Event ini mengundang banyak wisatawan, sehingga homestay dan hotel-hotel terisi penuh. Efek domino ini tentu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan pelaku seni, baik lokal," pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafii



Rendi Solihin saat menyampaikan sambutan di Festival Budaya Nusantara. (Istimewa)

Jamrud Tutup Festival Budaya Nusantara di Muara Badak, Wabup Rendi : Efek Besar Bagi UMKM

TENGGARONG - Penampilan band legendaris Indonesia, Jamrud, di Lapangan Kantor Camat Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), sukses paku ribuan penonton yang padati kawasan tersebut. Berbagai tembang andalan yang dibawakan oleh Jamrud, benar-benar sukses bikin para pencinta musik rock di Kukar dan sekitarnya terus bernyanyi dan menari.

Penampilan dari band yang dibentuk di kota Cimahi, Jawa Barat tersebut, sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan Festival Seni Budaya Nusantara yang berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2023.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pun mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menilai festival itu berhasil dan membawa berkah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muara Badak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Rendi Solihin, semua stand yang disediakan selama acara Festival Seni Budaya

Nusantara berlangsung laku keras. "Banyak daerah yang sudah mengikuti Kukar memberikan hiburan secara gratis tapi belum ada yang berkeliling ke kecamatan-kecamatan. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan multiplier efek," ucap Rendi.

Wabup Rendi juga mengaku senang, dengan terselenggaranya event ini. Tentunya membawa dampak yang sangat luas pada perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya terpusat di stand-stand yang telah disediakan panitia. Tapi juga memberikan dampak pada warung-warung kelontong, di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan yang ramai disinggahi para penonton untuk sekedar mengisi bahan bakar dan berbelanja.

"Saya senang pelaku UMKM laris manis, pedagang pentol laris, tolong juga dibeli jualan es tehnya," tandasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/Radar Kukar)

Sunggono Keluhkan Minimnya Peran Pemkab Kukar dalam Pembangunan IKN

TENGGARONG- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, keluhkan soal tidak adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Padahal menurutnya, sebagai wilayah yang nantinya akan bersebelahan langsung dengan IKN, seharusnya Kukar turut dilibatkan secara langsung. Mengingat seluas 199 km² dari total kurang lebih 256 km² wilayah IKN, merupakan wilayah Kukar yang tersebar di 5 kecamatan dan 34 desa dan kelurahan.

Kukar pun terdampak secara langsung, dikarenakan seluruh wilayah Kukar yang masuk ke dalam IKN merupakan daerah penghasil. Hal ini mengharuskan Pemkab Kukar kehilangan dana bagi hasil dari berbagai sektor senilai Rp 1,6 triliun.

"Pemkab Kukar merasa kecewa. Kami ingin dilibatkan secara langsung. Kami ini mitra strategis dari IKN, bukan daerah penyangga sebagaimana tertuang dalam undang-undang," ungkap Sunggono, Senin (23/10/2023).

Kekecewaan ini disampaikan langsung oleh Sunggono, pada Lucy Sumardi, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Saat melakukan kunjungan kerja, untuk memeriksa Kepatuhan Kegiatan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara 2022 dan 2023.

Padahal menurut Sunggono, Pemkab Kukar sudah banyak membangun infrastruktur

dan beberapa aset untuk menunjang pembangunan IKN. Hanya saja, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut di tatanan pemerintah pusat, apakah akan dikonversi atau dikompensasi.

Begitu halnya dengan rekrutmen pejabat IKN, secara khusus untuk ASN Kukar tidak mendapatkan kuota prioritas. Sehingga, pihaknya tidak dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk megaprojek tersebut.

"Kami sangat siap mendukung. Tapi kami tidak pernah dilibatkan, baik oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Kaltim untuk sama-sama membahas pembangunan ini," tambahnya.

Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan IKN. Ini dibuktikan dengan ketersediaan Kukar untuk diperiksa BPK RI selama 40 hari kerja.

Pada prinsipnya, kata Sunggono, Pemkab Kukar akan mendukung kegiatan BPK RI terkait dengan fungsi dan pengawasan. Pihaknya juga akan menyiapkan data serta alat pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

"Saya sudah menginstruksikan agar instansi yang menjadi lokus pemeriksaan dapat mendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan BPK RI," pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i

Safaruddin Sambangi Kukar, Bupati Paparkan Kondisi Kukar dan Strategi Percepatan Pembangunan

TENGGARONG - Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Safaruddin, melakukan lawatan ke Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (23/10/2023). Kunjungan legislator yang pernah menjabat sebagai kapolda Kaltim ini, disambut dengan hangat oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Didampingi Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah. Dalam kesempatan ini, Edi Damansyah turut mengucapkan selamat datang untuk salah satu wakil Kaltim di Senayan tersebut.

"Selamat datang kepada Komisi III DPR RI, semoga kunjungan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah," kata Edi.

Dalam kesempatan ini, Edi turut memaparkan kondisi geografis Kukar yang memiliki luas 27.263,10 km² dan secara administratif terbagi atas 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 765.284 jiwa.

Berdasarkan kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata, Edi mengakui kondisi pembangunan pun masih belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah di Kukar.

Pertama, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran pemerintah desa (pemdes), dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD).

Alokasi dana ini diberikan dalam bentuk program Rp 50 juta per RT yang dapat dipergunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar. Seperti penye-



Suasana kunjungan anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, ke Kukar. (Ady/Radar Kukar)

dian energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah.

"Implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022. Kami pun bangga, banyak kabupaten kota lain belajar BKKD Rp 50 juta per RT ini ke Kukar," terangnya.

Strategi kedua dengan menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan alokasi dana kepada kecamatan dan kelurahan. Sehingga, camat pun memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan secara berkala pada tingkat kecamatan.

"Kedua strategi ini sekarang telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, yang terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif," terangnya.

Menurutnya, kedua strategi tersebut berdampak pada kebijakan makro. Ini terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Kukar pada tahun 2023 sebesar 0,77 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 0,74, dengan jumlah desa bersta-

tus Mandiri 76 desa, Maju 69 desa, Berkembang 48 desa, dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

"Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini, memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah. Sekaligus sebagai kepanjangan lidah dalam menyampaikan harapan dan aspirasi warga Kutai Kartanegara," harapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin, mengaku bersyukur bisa menyambangi Kukar. Menurutnya, ini merupakan agenda silaturahmi wakil rakyat dengan pemerintah daerah hingga perangkat desa kelurahan dan RT.

Ia berharap, RT dan lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat prasejahtera. Hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstrem maupun stunting tepat sasaran. Ia pun meminta, agar Pemkab Kukar memperkuat pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan. Mengingat, Kukar saat ini merupakan salah satu penyuplai bahan pangan terbesar di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas," tandasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



MOMEN-MOMEN MENARIK NAN UNIK BCC 2023

BACA HALAMAN A2

**LNGTV Juara 1 Lomba
Video Pendek PUPRK, Berikut
Daftar Pemenangnya!**





FOTO FOTO: YUSVA ALAM

Gapura Selamat Datang Bontang.

Momen-momen Menarik nan Unik BCC 2023

BONTANG – Event Bontang City Carnival (BCC) 2023 sudah berlangsung, Sabtu (21/9/2023) kemarin di Simpang 3 Ramayana. Event yang terselenggara ketiga kalinya ini berlangsung sukses dan meriah. Mampu menyedot perhatian warga Bontang untuk datang menyaksikan carnival dan pawai budaya tersebut.

Banyak momen menarik nan unik yang tersaji dalam perhelatan rangkaian HUT Kota Bontang ini. Redaksi Radarbontang.com berupaya mengabadikan momen-momen menarik yang ada. Tak hanya dari penampilan para peserta, namun juga para panitia dan pengisi acara, serta penonton. Berikut hasil jepretan redaksi:

Penulis/Editor. Yusva Alam
Fotografer. Yusva Alam



Costplay uang kertas.



Penonton menyaksikan dari atas pagar demi melihat penampilan peserta.



MC dan pengisi acara.



Kostum dari bahan daur ulang.



Mempromosikan gerakan budidaya ikan lele.



Panas terik tak menyurutkan warga Bontang menyaksikan BCC 2023.



Event BCC membawa berkah bagi pedagang asongan.



Satpol PP mengamankan rute yang dilewati peserta.



Kadisdikbud Bambang Cipto Mulyono (tengah) saat raker terkait BCC 2023 bersama DPRD Bontang. (Yusva Alam)

Disdikbud Keluhkan Kewenangan SMA/SMK di Provinsi, Sutarmin: Perkuat Kajian Sebagai Dasar Tuntutan

BONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengeluhkan kondisi SMA/SMK yang kewenangannya masih berada di Provinsi Kaltim. Lantaran kondisi tersebut pihaknya tidak bisa turut campur di SMK/SMK.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Bambang mengeluhkan kondisi ini, lantaran menyebabkan pihaknya tidak bisa memberikan bantuan atau memanfaatkan SMA/SMK untuk turut dalam memajukan Bontang. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa mengukur tingkat pendidikan warga Bontang, karena untuk mengukur berapa persen yang lulus atau diterima di kampus, dan sebagainya

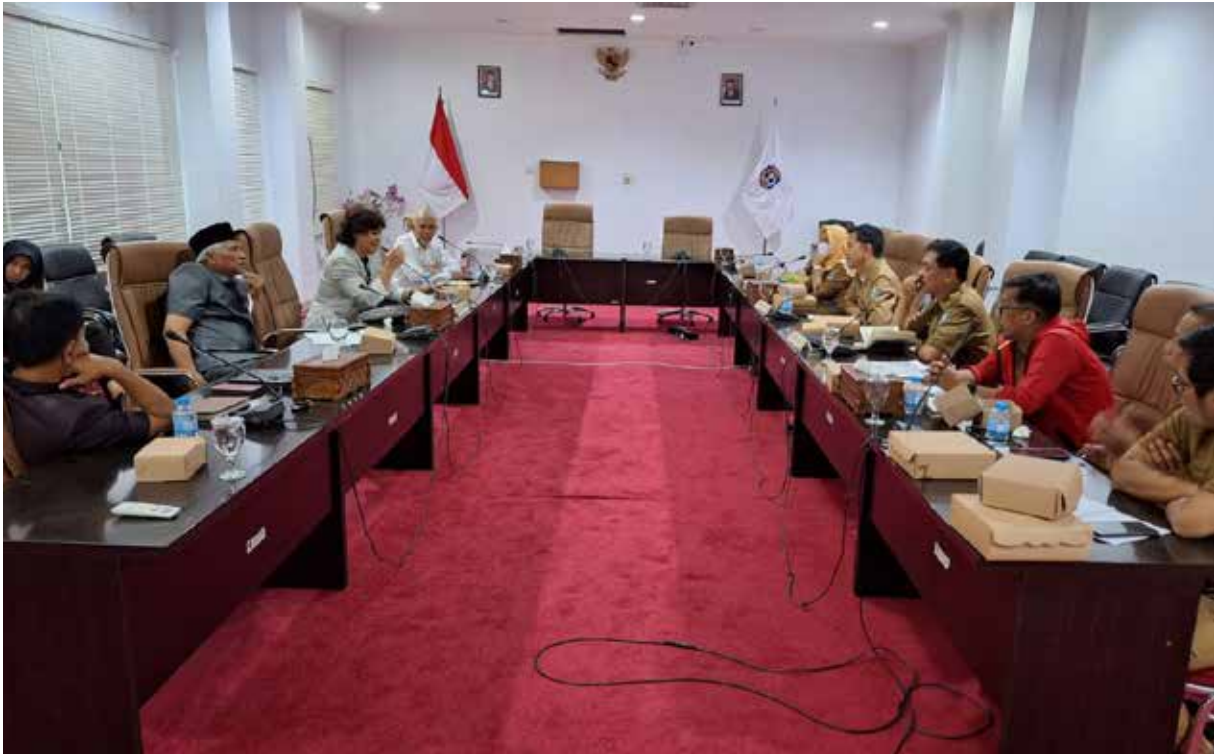
harus sampai tingkat pendidikan SMA/SMK.

"Saya sudah keluhkan hal ini ke Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dan juga Dirjend Pendidikan RI. Kami takut menyalahi kewenangan apabila melanggar aturan tersebut," bebernyanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sutarmin menjelaskan, bahwa Komisi II DPRD Bontang bersama DPRD Kukar pernah diundang oleh Komisi II DPR RI untuk membahas masalah ini salahsatunya.

Dikatakannya, untuk dapat mengembalikan kewenangan SMA/SMK ke daerah, maka harus memperkuat kajian. Sehingga memiliki dasar yang kuat untuk meminta kembalinya kewenangan SMA/SMK ke daerah.

"Tuntutannya harus berdasar yang kuat. Mungkin OPD terkait bisa berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk bekerjasama menyampaikan tuntutan dan alasan meminta kembalinya wewenang SMA/SMK ke daerah," beber Sutarmin. (al/adv)



Raker Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. (Yusva Alam)

Masih Skala Lokal, Pemkot Diminta Promosikan BCC di Media Nasional dan Internasional

BONTANG – Anggota DPRD Bontang meminta Pemkot Bontang untuk terus meningkatkan kualitas event Bontang City Carnival (BCC). Tidak hanya skala lokal namun mampu meningkat jadi skala nasional bahkan internasional.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Dijelaskan Pimpinan Rapat, Nursalam, bahwa pihaknya akan selalu mensupport apapun kebijakan pemerintah daerah, asalkan memberikan efek positif bagi masyarakat. Termasuk salahsatunya menggelorakan budaya-budaya lokal dan pariwisata yang ada.

Menurutnya, saat ini BCC sifatnya masih skala lokal, belum nasional bahkan internasional. Belum bisa menjadi perhatian wisatawan mancanegara (wisman) untuk datang melihat.

"Di Jember itu saya lihat sampai bule-bule datang menonton. Kalau kita hanya bikin BCC ini sebagai rutinitas akan sulit menarik minat wisman," ujar Anggota Komisi II DPRD Bontang ini.

Bakhitiar Wakkang mengungkapkan hal yang sama. Agar BCC dapat berubah skalanya menjadi event internasional, menurutnya dibutuhkan publikasi di media-media nasional, bahkan media internasional.

Untuk dapat meningkatkan kualitas BCC tersebut, menurutnya lagi dibutuhkan juga kajian induk agar memiliki legal standing. Dengan begitu dapat memberi dampak multiplier effect.

"Jangan hanya berharap pada APBD, tapi juga berusaha untuk bisa dapat APBN. Agar BCC ini dapat terus berkembang," ungkap Politisi Partai Nasdem itu.

Kadisdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono menanggapi permintaan tersebut. Diakuinya, branding BCC saat ini belum setingkat nasional. Sehingga BCC belum banyak dikenal masyarakat luar.

Karenanya pihaknya berencana untuk menggandeng Diskominfo Bontang agar dapat membranding BCC hingga level nasional bahkan internasional. Perlu juga untuk mempromosikan BCC di media-media skala nasional dan internasional.

"Semoga ke depan kami dapat terus meningkatkan BCC," imbuhnya singkat. (al/adv)



Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam (tengah) saat memimpin raker terkait BCC 2023. (Yusva Alam)

Legislatif Sebut Ada Potensi Pariwisata Digabung Kebudayaan Jadi Dinas Tersendiri

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mempertanyakan kepada Pemkot Bontang, mengapa tidak menjadikan pariwisata sebagai dinas tersendiri. Karena menurutnya, apabila pemkot ingin fokus meningkatkan pariwisata, maka harus ada dinas sendiri yang mengurus masalah tersebut.

Hal itu diungkapkan Nursalam usai Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Diungkapkannya, dirinya dulu pernah mendengar bahwa pemkot akan menjadikan pariwisata prioritas sendiri. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum juga terwujud. Karenanya ia menyangkan kondisi tersebut.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Lembaga

Administrasi Negara (LAN), bahwa ada potensi pemkot untuk bisa menggabungkan pariwisata dengan kebudayaan, agar menjadi dinas tersendiri menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), bahkan bisa ditambah Ekonomi Kreatif yang masih sehubungan.

"Padahal LAN sudah menawarkan ke Bontang. Saya tidak tahu apakah wali kota mau atau tidak dengan tawaran itu, tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi," bebernya.

Dijelaskannya, seandainya pemkot punya dinas sendiri untuk pariwisata dan kebudayaan, maka anggaran dan penyelenggaraan Bontang City Carnival (BCC) tidak perlu lagi di bawah Disdikbud. Disdikbud bisa fokus mengurus pendidikan saja.

"Kenapa saat ini penyelenggaraan BCC ada di Disdikbud, karena hanya di Disdikbud yang ada bidang kebudayaan. Di Dispopar yang membidangi pariwisata pun secara UU tidak bisa," pungkasnya. (al/adv)



dr Siti Chodijah, dokter penanggung jawab klinik IPWL RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

RSUD Bontang Punya Klinik IPWL untuk Rehab Pecandu Narkotika

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki Klinik Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk oleh pemerintah, untuk menangani pasien rehabilitasi pecandu narkotika dengan tingkat ringan, sedang, dan berat.

Dokter Penanggung Jawab Klinik IPWL, dr Siti Chodijah menjelaskan, klinik IPWL RSUD Bontang ada untuk memberikan bantuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan RI kepada RSUD Bontang.

Dr Siti Chodijah mengatakan, IPWL RSUD dipertanggungjawabkan bagi masyarakat atau keluarga yang ingin merehabilitasi anggota keluarga yang telah mengalami kecanduan narkotika.

"Ada dua di Kota Bontang, salah satunya RSUD Bontang. Untuk rehabilitasinya terbuka untuk umum. Siapa saja bisa bagi anggota keluarga yang merasa memiliki kerabat yang kecanduan narkoba," kata dr Siti Chodijah.

Lebih lanjut Ia menambahkan, pasien terlebih dahulu akan dilakukan asesmen apakah memiliki tingkat kecanduan ringan, sedang, atau berat.

"Akan kita asesmen ketergantungannya. Sejauh mana dia (pasien) memiliki ketergantungan. Kalau

ringan dan sedang bisa kami rehab. Kalau berat akan kami rujuk ke BNNK Bontang atau ke tempat rehabilitasi tanah merah. Itu semua dimulai dari skrining kesehatan," lanjutnya.

Selain merehabilitasi pecandu narkoba dengan asesmen, klinik IPWL RSUD Taman Husada Kota Bontang juga melakukan konsultasi kesehatan terkait pecandu narkoba dengan dilakukan oleh dokter psikiater.

"Kita di sini ada dokter psikiatri. Kalau memang nanti diperlukan terapi obat-obatan atau hanya wawancara motivasi, semua kita lakukan di sini," katanya.

Chodijah menyebutkan IPWL RSUD sendiri telah beroperasi sejak tahun 2018. Namun baru aktif kembali pada 2022 semenjak pandemi Covid-19 terjadi. Untuk penanganan kasus sepanjang pada tahun 2022, ada sebanyak 5 pasien yang ditangani. Sedangkan untuk tahun 2023 berjalan ini ada 2 pasien yang ditangani.

"Pasiennya sih tidak mengantre dengan kategori ringan dan sedang. Untuk rehabnya dilakukan rawat jalan dengan memberikan kartu rawat jalan yang akan terus dievaluasi. Rehabnya bisa dilakukan sampai 2 hingga 3 bulan dengan 8 kali pertemuan," jelasnya. (yah/adv)



Pengumuman para pemenang lomba video pendek Dinas PUPRK di Welcome Party Event Bontang Animal Fest. (Ist)

LNGTV Juara 1 Lomba Video Pendek PUPRK, Berikut Daftar Pemenangnya!

BONTANG – Puncak acara lomba video pendek garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang berlangsung, Jumat (20/10/2023) lalu. Pada puncak acara yang berlangsung di kegiatan Welcome Party Event Bontang Animal Fest, dibacakan para pemenang lomba video pendek.

Berikut daftar pemenang lomba video pendek Dinas PUPRK:

JUARA

1. LNGTV
2. Asli Bontang
3. D'BOND

JUARA HARAPAN

1. Penden
2. V Project
3. Fantastic Four

JUARA FAVORIT: Visit Bontang

JUARA PESONA: Gading

"Alhamdulillah kegiatan berjalan sangat baik. Barometer salah satunya ditandai dengan ban-

yaknya peserta yang ikut mendaftar," ujar Kepala Dinas PUPRK Bontang, Usman, melalui Sekretaris, Iskandar.

Ditambahkannya, video terbaik (juara 1) akan dipublikasikan ke media sosial, termasuk di web yang dikelola oleh Dinas PUPRK.

"Salah satu tujuannya adalah karena PUPRK mendukung upaya untuk peningkatan kemajuan sektor pariwisata Kota Bontang," ungkapnya.

Diketahui, sebanyak 7 nominator berhasil lolos ke babak akhir, untuk dipilih karya yang akan menjadi pemenangnya.

Selama lomba berlangsung terdapat 25 tim yang mengikuti lomba yang dimulai sejak tanggal 30 September 2023 tersebut. Dari 25 tim tersebut yang telah menyerahkan karya video untuk dinilai tim juri sebanyak 16 karya video.

"Usai penilaian dari tim juri, ke-25 tim tersebut mengerucut menjadi 7 tim yang berhasil masuk nominasi," jelasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam



Konvoi kendaraan start di halaman parkir Masjid Al-Firdaus (kantor wali kota lama). (Dwi S)

Aksi Bela Palestina: Konvoi, Galang Dana, hingga Tabligh Akbar

BONTANG – Kepedulian terhadap warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel ditunjukkan oleh seluruh dunia, tak terkecuali di Bontang. Aksi bela Palestina berlangsung, Minggu (22/10/2023) sore kemarin dengan beragam agenda kegiatan.

Asep Gumilar Widi Mulyadi, Ketua Pelaksana Aksi mengatakan, adanya kegiatan ini dilakukan untuk menggalang aksi solidaritas, dan memberi dukungan terhadap warga Palestina yang tertindas.

"Aksi ini kami lakukan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menunjukkan kepedulian kaum muslimin yang berada di Indonesia," ucapnya.

Beragam kegiatan yang diadakan selama aksi di antaranya; konvoi kendaraan keliling Bontang oleh beberapa komunitas, lalu ada tabligh akbar yang berlangsung di Masjid Raya Al-Hijrah, Tanjung Laut, serta menggalang donasi.

Dijelaskannya, kegiatan konvoi ini dibuka untuk umum, siapa saja boleh mengikuti konvoi kendaraan maupun tabligh akbar. Dalam kegiatan ini, ada

beberapa organisasi, komunitas, pelajar, bahkan mahasiswa Kota Bontang.

"Semua orang boleh ikut, boleh turut serta dalam konvoi kendaraan dan tabligh akbar ini, karena kegiatan ini untuk umum," paparnya.

Beberapa organisasi atau komunitas yang ikut konvoi antara lain, Organisasi Bontang Berbagi (OBB), RUAS, Cipur Projec, Salimah Bontang, ODOJ Bontang, Pesantren Subulana, Himpib, Baitul Mal Hidayatullah, Bontang Owner Scooter Club/ Vespa Bontang) BOSC, GM FKPP, Bapasak, Kawan Bontang, LBN, BEM STTI Bontang, HPRM, Kurma Al Amin, IPMAN, KKABAB, Remz Loktuan, KKP Bone, dan Teras Cinta Yatim Bontang (TCYB).

"Di konvoi ini, target kami yang ikut turut serta seribu peserta. Konvoi kendaraan start bada ashar sekira pukul 16.00 wita. Finish di Masjid Al-Hijrah pukul 18.00 wita, atau menjelang adzan magrib," untkapnya.

Untuk rute konvoi kendaraan, titik kumpul bertempat di halaman parkir Masjid Al-Firdaus Pemkot (Pemerin-

tah Kota) lama, Jalan Awang Long, Bontang Baru, menuju Jalan Bhayangkara, Loktuan, putar arah hingga didekat Pelabuhan Loktuan, kembali ke Jalan Bhayangkara, Jalan Wr. Soeprapto, Jalan Ahmad Yani, Gunung Sari, Tanjung Laut, Berbas, dan finish di Masjid Al-Hijrah.

"Setelah konvoi, baru kami mengadakan tausiyah atau tabligh akbar yang diisi oleh Ustad Asha Nurahmad, beliau mubalig dari Samarinda. Ada pun doa bersama dan galang dana di area Masjid Al-Hijrah," bebernya.

Asep juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini berharap semoga masyarakat Kota Bontang memiliki kesadaran, kepedulian terhadap warga Palestina. Bisa saling mendoakan, dan juga memberikan bantuan dananya untuk meringankan saudara-saudara yang berada di Palestina.

"Untuk nomor rekening kami pun sudah mencantumkan, jadi bagi anda yang ingin mentransfer atau mau memberikan cash langsung bisa menghubungi panitia," tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Butuh Islam Kaffah Atasi Masalah Pergaulan Bebas Remaja

KASUS aborsi yang terungkap di Tanjung Laut turut mendapat atensi dari legislator. Kasus ini dinilai karena pergaulan bebas di lingkungan remaja hingga menyebabkan korban jiwa.

Bukan hanya aborsi, peredaran narkoba maupun minuman keras juga perlu diawasi bersama-sama. Selama ini penegakan hukum menjadi ujung tombak, seharusnya pendekatan persuasif dikedepankan.

Namun, revolusi mental dan pembentukan karakter membutuhkan dukungan setiap pihak. Maka dari itu, keluarga, tetangga hingga kelompok sosial harus bersama bergandengan tangan demi menciptakan lingkungan sosial yang sehat, ujar Rustam dari Fraksi Golkar. (Klikkaltim)

Krisis Pergaulan Bebas Remaja, Akibat Sekuleris Mengkhawatirkan dan miris adalah kata yang paling tepat jika melihat fenomena pergaulan remaja saat ini. Wajar jika hal ini mendapat atensi yang serius di semua kalangan.

Angka aborsi terus meningkat, juga peredaran narkoba dan minuman keras ini tidak lagi bisa dilihat sebagai hal yang sudah zaman nya. Namun harus dilihat bahwa satu saja perbuatan ini jika dilakukan adalah sebuah kemaksiatan. Setiap kemaksiatan akan memberikan dampak bahaya juga kerusakan, dan ini tidak hanya untuk si pelaku namun juga untuk semua masyarakat yang ada di sekitarnya.

Sumber persoalan yang semakin marak dan meningkat ini adalah karena mengadopsi sistem sekuleris yang menumbuh suburkan budaya liberal. Dalam adopsi sistem ini hormon pubertas nya di eksploitasi secara bebas tanpa batas melalui tayangan, gaya hidup dan saat ini pun kondisi yang ada menjadikan industri hiburan sebagai ajang kreativitas. Hal ini bukanlah kreativitas, justru hal ini mengarah pada kemaksiatan itu sendiri.

Di sisi yang lain pembelajaran tentang konsep agama sangat minimalis, wajar karena sekuleris membawa asas memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga generasi disorientasi hidup. Narkoba yang sejatinya adalah produk haram, namun tak pernah tuntas di selesaikan, selama ada permintaan dan penawaran, maka hal ini pun tidak akan tuntas.

Selama sistem sekuleris liberal ini masih diadopsi, maka fenomena dan angka kemaksiatan ini akan



Oleh:

Dinnar Fitriani S

*Aktivis Muslimah
Balikpapan*

terus bertambah. Karena solusi yang di berikan tidak pernah menyentuh asas mendasar pada sumber persoalan penyebabnya. Sehingga butuh sebuah sistem yang mampu menyelesaikan secara tuntas yang menyentuh asasnya.

Islam Solusi Atas Seluruh Pergaulan Bebas Remaja

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Setiap insan yang melaksanakan seluruh aturan Islam akan hidup mulia dan terhormat.

Islam memandang generasi adalah penerus peradaban dan pemimpin

terbaik. Dengan sudut pandang inilah Islam akan menjaga generasi secara komprehensif dengan Syariat Islam.

Kamu (umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (QS Al Imran ayat 110)

Dari ayat ini, Allah Subhana wa ta'ala mengabarkan kepada umat Islam, bahwa umat ini adalah terbaik, termasuk generasi. Sehingga untuk mendapatkan predikat umat terbaik, maka generasi membutuhkan syariat Islam.

Dan untuk melaksanakan proses penjagaan generasi inilah butuh seorang Khalifah yang menerapkan seluruh aturan Islam.

Khalifah akan menerapkan sistem Islam, mulai dari sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem sanksi, sistem pendidikan berlandaskan pada syariat Islam.

Hal ini harus diterapkan secara menyeluruh, karena menjaga generasi sebagai penerus butuh tanggung jawab dari semua pelaksana sistem.

Selain itu, setiap individu, masyarakat juga akan menjaga kondusifitas suasana ketakwaan. Dengan landasan takwa inilah maka generasi memiliki peran strategis untuk mewujudkan filosofi tujuan hidup nya.

Dari sini bisa dilihat bahwa satu - satunya solusi untuk menyelesaikan pergaulan bebas remaja adalah dengan sistem Islam. (*)



HARAP LOMBA PERAHU PANJANG MASUK KALENDER PARIWISATA



**TINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PESISIR
LEWAT BANTUAN HEWAN TERNAK**



Lomba perahu panjang di Berau diharap Madri Pani dapat menjadi event nasional.

HARAP LOMBA PERAHU PANJANG MASUK KALENDER PARIWISATA

TANJUNG REDEB - Perlombaan perahu panjang yang selalu digelar setiap tahun dianggap Ketua DPRD Berau, Madri Pani layak masuk kalender pariwisata dan dijadikan event nasional.

Dia menuturkan, dalam perlombaan perahu panjang tersebut, terdapat 36 peserta dari berbagai kampung dan Kelurahan dari beberapa kecamatan.

"Dengan adanya lomba perahu panjang, saya nilai bisa menjadi daya tarik wisatawan juga, karena terbukti banyak masyarakat yang menonton," ungkapnya.

Dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk sering mengadakan per-

lombaan perahu panjang tersebut.

"Tetapi panitia yang ditunjuk harus selektif, karena sempat ada interupsi akibat adanya dugaan peserta dari luar Berau," tegasnya.

Madri tidak menyalahkan adanya peserta dari luar, namun karena ini eventnya lokal, sebaiknya memprioritaskan para warga lokal terlebih dahulu. Jika ingin, membawa atlet luar, sebaiknya dibuat event yang lebih besar, dengan mengundang daerah lain. Tentu hal ini menjadi sangat menarik.

"Jadi gini, kegiatannya bisa diarahkan ke lebih besar, hadiah-

nya dibesarkan lagi, saya yakin, banyak daerah lain yang mau ikut," ujarnya.

Di sisi lain, dengan adanya perlombaan perahu ini, berpengaruh besar pada perputaran ekonomi di daerah Tepian Ahmad Yani, dan Tepian Gunung Tabur. Ratusan warga berkumpul, untuk menyaksikan kegiatan tersebut dan mendorong mereka, untuk membeli jajanan pelaku UMKM.

"Itu pasti, makanya, kegiatan seperti ini, bisa sering dilakukan. Selain menjadi daya tarik wisatawan, juga meningkatkan perekonomian masyarakat," tutupnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari saat reses di Kecamatan Teluk Bayur.

RESES SRI KUMALASARI, MASYARAKAT KELUHKAN INFRASTRUKTUR

TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari melaksanakan reses di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Segah, Teluk Bayur dan Gunung Tabur.

Ia menuturkan, dalam resesnya banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan infrastruktur yang belum merata. Seperti jalan-jalan yang ada di wilayah perkampungan.

"Saya ada reses di tujuh titik, rerata masyarakat mengeluhkan infrastruktur, karena mereka nilai jalan merupakan menunjang perekonomian," katanya.

Lanjutnya, dirinya berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut dan disampaikan pada rapat penyampaian hasil reses nantinya. Ia sendiri akan mengawal semua aspirasi yang ia tampung untuk diperjuangkan agar bisa direalisasikan.

Para Ibu Rumah Tangga (IRT), lanjut Sri Kumalasari, mereka meminta dibuatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Baik itu yang sudah memiliki usaha atau belum.

"Pelatihannya itu seperti menjahit, membuat batik, tata boga dan sebagainya, tujuannya agar mereka mendapat penghasilan tambahan," jelasnya.

Kendati demikian, beberapa kampung seperti Merancang dan Batu-batu di Kecamatan Gunung Tabur yang rata-rata mata pencahariannya adalah nelayan mengusulkan bantuan ketinting dan alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan.

"Semua yang menjadi prioritas akan terus saya perjuangkan, karena memang pasti ada kepentingan masyarakat di dalamnya," pungkasnya. **(adv/set)**



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris saat menyerahkan bantuan 23 ekor sapi di Kampung Dumaring lewat dana pikir.

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR LEWAT BANTUAN HEWAN TERNAK

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris menyerahkan bantuan hewan ternak 23 ekor sapi secara langsung kepada kelompok ternak sapi di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan.

Dia mengatakan, kelompok ternak sapi yang menerima bantuan harus memanfaatkan bantuan tersebut dengan maksimal, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya.

"Saya harap hewan ternak yang diberikan bisa dipelihara dengan baik, agar kedepannya bisa terus dikembangkan," katanya.

Dirinya mengaku sangat menginginkan dalam budidaya ternak, penerima bantuan dapat memperhatikan kawasan lingkungan untuk dapat tetapi bersih dan sehat.

Abdul Waris juga bertekad akan melanjutkan bantuan serupa demi kembali menggali ekosistem peternakan maupun ekosistem per-

ekonomian masyarakat.

"Karena program-program seperti ini dapat menjadi upaya menggali ekosistem peternakan yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Politikus Demokrat ini menyebut, program-program seperti pemberian bantuan hewan ternak dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat pesisir selatan Bumi Batiwakkal.

Lebih lanjut, Ketua Kelompok Ternak Sapi Kampung Dumaring, Bruno mengucapkan terimakasih kepada Abdul Waris. Disampaikan, bantuan tersebut diusulkan pada reses tahun lalu.

"Saya sangat bersyukur karena usulan kami terealisasi. Kami juga sangat mengapresiasi. Kami ingin anggota dewan seperti beliau, tidak hanya janji-janji saja waktu reses, tetapi tidak ada realisasinya," tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

ADA TIGA BUMD DI BERAU, HARAP BERKONTRIBUSI MAKSIMAL TINGKATKAN PAD

TANJUNG REDEB – Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta legislatif untuk berkontribusi. Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang menuturkan, PAD dari BUMD belum menyentuh angka 10 persen dari jumlah APBD.

“Jadi hal itu perlu ditingkatkan, kontribusi BUMD untuk menyumbang PAD masih rendah,” katanya.

Diketahui, Berau memiliki tiga BUMD, yakni PT Indo Pusaka Berau (IPB), Perumda Batiwakkal, dan juga PT Hutan Sanggam. “Ketiga perusahaan tersebut belum diketahui secara jelas berapa sumbangannya terhadap PAD,” jelasnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar tersebut mendorong perusahaan yang dinaungi BUMD untuk turut berkontribusi dan berperan aktif dalam peningkatan PAD Kabupaten Berau.

“Jadi saya dorong kepada BUMD untuk saling kontribusi demi kemajuan pembangunan Daerah kita,” bebarnya.

Di sisi lain, Ratna juga meminta untuk OPD bisa berinovasi dalam mengembang-

kan PAD. Termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau. Peralnya pariwisata Berau digadang-gadang menjadi sumber pengganti batu bara yang selama ini masih bercokol di posisi pertama sebagai penyumbang PAD terbesar yakni 64 persen.

“Masuknya IKN ini dan Berau dianugerahi wisata yang indah. Harusnya bisa menjadi momen kebangkitan,” tuturnya.

Ia juga meminta Disbudpar agar tidak selalu merengek soal minimnya anggaran. Namun harus bisa memberi inovasi agar mendapatkan bantuan anggaran dari provinsi maupun pusat.

“Harus bisa inovasi. Jangan selalu bersandar pada minim anggaran,” ucapnya.

Inovasi dalam pembangunan pariwisata perlu gencar dilakukan. Begitu juga untuk sosialisasi. Event yang masuk dalam kalender pariwisata perlu dibenahi. Dan ditambah inovasinya. Agar masyarakat bisa juga menikmati.

“Banyak yang harus dibenahi. Saya harap OPD lainnya juga turut memberikan kontribusi untuk PAD,” pungkasnya. (adv/set)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

PEMERINTAH HARUS CARI SOLUSI, ATASI KEKURANGAN PERSONEL DAMKAR

TANJUNG REDEB – Jumlah personel pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Berau masih kurang. Namun, untuk menambahnya terhalang regulasi mengenai rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT). Menyoroti persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, meski saat ini tidak boleh ada penambahan PTT, pemerintah harus tetap mencari solusi yang tepat.

“Personel pemadam kebakaran ini sangat dibutuhkan dan penting. Harus dicarikan solusinya seperti apa,” tegasnya.

Dirinya mengaku siap mengawal, jika usulan penambahan personel damkar masuk dalam rencana anggaran. Sehingga, Peri mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun perencanaan sesuai kebutuhan tenaga yang dibutuhkan.

“Mengingat wilayah kita ini sangat luas, tentunya setiap pos BPBD di setiap kecamatan harus memiliki jumlah personel yang cukup,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini menilai, pemenuhan personel Damkar di setiap pos kecamatan sangat penting, agar penanganan suatu kejadian dapat lebih cepat. “Terlebih ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu memerlukan banyak personel, agar cepat tertangani. Jadi saya kira ini harus jadi suatu perhatian,” katanya.

Peri berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat segera menangani persoalan keterbatasan personel damkar tersebut dengan maksimal. “Ini kebutuhan urgent, sebaiknya secepatnya dicarikan solusinya. Karena menyangkut dengan penanganan bencana,” pungkasnya. (adv/set)



KUNKER KE KALTIM, WAPRES HADIRI SILATNAS KE-VII KONSAIN



**ARDIASNYAH MINTA KEJELASAN
DISDIKBUD SOAL PEMBANGUNAN
SEKOLAH DI BALTENG**



Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin akan melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (23/10).

KUNKER KE KALTIM, WAPRES HADIRI SILATNAS KE-VII KONSAIN

BALIKPAPAN - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin akan melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (23/10/2023). Menggunakan pesawat khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan pada pukul 14.30 Wita.

Setelah menempuh penerbangan sekitar 2 jam dan 10 menit, Wapres tiba di Balikpapan pada pukul 17.40 Wita dan akan disambut oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik beserta Ibu Yulia Zubir Akmal Malik dan Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta pendamping masing-masing.

Kegiatan Wapres diagendakan pada hari Selasa (24/10/2023)

sekitar pukul 10.00 Wita, di mana Wapres dan rombongan akan menuju ke Pondok Pesantren Syaichona Cholil, di Gg. Arjuna No.59, Sepinggang, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut, Wapres akan menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain).

Dalam acara ini, Wapres akan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Konsain dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan pembacaan Ikrar Santri. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2023.

Usai menghadiri Silatnas ke-VII Konsain, Wapres dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Wapres dan

rombongan akan lepas landas dari Bandar Udara Internasional SAMS Sepinggang Balikpapan menuju Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalteng, pada pukul 13.15 Wita.

Selain Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, hadir pula pada kunjungan kerja ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputy Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wakil Presiden Zumorotul Mukaffa, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Tengah, Ardiansyah.

ARDIASNYAH MINTA KEJELASAN DISDIKBUD SOAL PEMBANGUNAN SEKOLAH DI BALTENG

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan meminta kejelasan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar segera menentukan lokasi pembangunan sekolah baru di kawasan Kecamatan Balikpapan Tengah.

Pasalnya, hingga saat ini lokasi pembangunan sekolah baru di kawasan Balikpapan Tengah belum menemukan titik kejelasan. Meskipun anggaran fisik pembangunan sekolah telah dianggarkan sebesar Rp 30 miliar dari APBD Balikpapan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Tengah, Ardiansyah.

"Hingga saat ini belum mendapatkan info terbaru mengenai lokasi pembangunan sekolah baru untuk wilayah Balikpapan Tengah," ujarnya Senin (23/10/2023).

Ardiansyah menyebut, informasi terakhir yang diperolehnya jika lokasi pembangunan sekolah Balikpapan Tengah yang awalnya berada di ka-

wasan Jokotole, akan dialihkan ke Lapangan Tenis Manuntung yang berada di Telaga Sari.

"Di mana aja tempatnya yang penting saya mau itu dibangun, karena anggaran pembangunan fisik sudah dianggarkan Rp 30 milyar. Intinya Balikpapan Tengah membutuhkan sekolah baru," jelasnya.

"Setidaknya jika sudah ada kepastian lokasi maka sesegera mungkin DED diselesaikan," tambahnya.

Ardiansyah khawatir jika tidak ada kepastian lahan maka pembangunan sekolah tidak akan terealisasi. Mengingat lahan sekolah sudah ada dan merupakan aset Pemkot Balikpapan, jadi tidak ada alasan lagi sekolah tidak terbangun.

"Saya sebagai anggota dewan dapil Balikpapan Tengah sangat menyayangkan jika sekolah tidak terbangun, jangan sampai ada pergeseran anggaran lagi. Pasti saya protes," tutupnya. (ADV)

Pewartu : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari

EKSEKUSI ASET PT DYS BELUM DILAKSANAKAN, PEMOHON DATANGI PN BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan akan melakukan sita eksekusi terhadap aset PT Dian Yuspa Samudera (DYS). Hal ini menyusul permohonan eksekusi yang diajukan oleh Jovinus Kusmadi, pemohon eksekusi dalam perkara gugatan ingkar janji dan wanprestasi oleh PT DYS Dalam perkara bernomor 146/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah memutuskan bahwa PT DYS telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Majelis Hakim juga memerintahkan PT DYS untuk mengembalikan perizinan-perizinan kepada Jovinus Kusmadi berupa dermaga. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui proses banding dan kasasi pada tanggal 23 Mei 2023, Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengeluarkan penetapan teguran eksekusi.

Penetapan tersebut memerintahkan PT DYS untuk melaksanakan putusan pengadilan pada 13 Juni 2023. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, PT DYS belum melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, Jovinus Kusmadi mengajukan permohonan sita eksekusi.

Pada tanggal 4 Juli 2023, Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Penetapan tersebut memutuskan juru sita eksekusi terhadap aset PT DYS. Sayangnya, pelaksanaan sita eksekusi belum bisa dilakukan dikarenakan PT DYS juga tengah mengajukan gugatan terhadap Jovinus Kusmadi di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Bpp.

Kuasa hukum Jovinus Kusmadi, Saur Oloan Hamongan Situngkir dan Tumpak Parulian Situngkir, mempertanyakan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terkait gugatan wan-



Kuasa hukum Jovinus Kusmadi, Saur Oloan Hamongan Situngkir dan Tumpak Parulian Situngkir saat di PN Balikpapan.

prestasi yang diajukan PT DYS terhadap Jovinus Kusmadi. Mengingat, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui proses banding dan kasasi. Dan hingga saat ini pelaksanaan eksekusi belum bisa dilakukan karena masih menunggu koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.

"Kami mempertanyakan bagaimana tindak lanjut. Artinya permohonan yang kami ajukan belum dapat dilakukan karena ada gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Bpp," ujar Saur Oloan Hamongan Situngkir, Senin (23/10/2023) di PN Balikpapan.

Menurutnya, putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Bpp yang telah inkrah sudah sewajarnya untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda sekalipun ada gugatan lain.

"Harapannya, Pengadilan Negeri dalam hal ini kembali mengulas secara komprehensif, apakah memang ada kaitan antara perkara Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Bpp dengan Nokoe 146/Pdt.G/2017/PN Bpp yang sudah inkrah," jelas Saur Oloan Hamongan Situngkir.

Tumpak menambahkan, PT DYS dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Bpp mengajukan gugatan terhadap Jovinus Kusmadi dan beberapa pihak. Menurut dia, gugatan tersebut tidak ada kaitannya dengan putusan No-

mor 146/Pdt.G/2017/PN Bpp, yang semestinya penyitaan tetap bisa berjalan.

"Jadi nilainya sesuai putusan-nya, (PT DYS) membayar sebesar Rp 9,7 miliar. Karena dalam waktu yang ditentukan UU, PT yang bersangkutan belum membayar, maka sudah ada penetapan juru sita eksekusi tanggal 4 Juli 2023," tambahnya.

Kuasa hukum Jovinus Kusmadi berharap, Pengadilan Negeri Balikpapan segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

"Putusan inkrah harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum," tegas Tumpak.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Balikpapan, Arif Wisaksono mengaku jika pihaknya masih akan mempelajari putusan tersebut.

"Saya baru terima ini mas, saya akan pelajari dulu seperti apanya ya," ujarnya.

Arif mengaku, jika dirinya tidak ingin berkomentar jauh perihal putusan tersebut. Namun jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka sebaiknya langsung di eksekusi.

"Harusnya ya langsung. Tapi saya pelajari dulu ini putusan dan perkaranya ya," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Korlap IB, Ruslan menerima radio HT dari pembina Info Bencana Balikpapan H. Bisri Mustofa, Senin (23/10).

PEMBINA IB BALIKPAPAN SERAHKAN RADIO HT UNTUK PERMUDAH KOMUNIKASI

BALIKPAPAN - Info Bencana (IB) Kota Balikpapan kembali mendapatkan dukungan bantuan kelengkapan alat komunikasi berupa radio handy talkie (HT) pada Senin (23/10/2023).

Kali ini bantuan radio HT diberikan langsung oleh pembina Info Bencana Balikpapan, H Bisri Mustofa kepada Ruslan selaku Korlap Info Bencana Balikpapan,

H Bisri Mustofa mengatakan, alat komunikasi berupa radio HT ini sangat penting dan dibutuhkan di lapangan dalam penanganan kebencanaan di kota Balikpapan.

"HT ini bagian dari getaran hati untuk Info Bencana, biar selalu terdepan dalam penanganan bencana. HT ini alat komunikasi yang memudahkan antar anggota," ujarnya.

Lebih lanjut H Bisri Mustofa menjelaskan, dengan komunikasi yang cepat, yakni melalui radio HT ini maka jika terdapat informasi di lapangan terkait kebencanaan bisa segera di validkan alias AI kan.

Sementara itu, Ruslan mengaku sangat berterima kasih atas bantuan berupa 2 unit radio HT yang diberikan langsung oleh seorang dewan pembina Info Bencana Balikpapan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, yang selama ini meneliti grup Info Bencana. Meskipun jarang komen, tapi beliau memperhatikan grup Info Bencana. Inilah salah satu kesan luar biasa dan berkah," ujarnya.

Ruslan menambahkan, H Bisri Mustofa juga merupakan pembina yang mana pada 5 tahun lalu juga memberikan bantuan berupa sepeda motor trail yang di gunakan oleh relawan kebencanaan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

Nantinya 2 unit radio HT yang diterimanya ini akan diserahkan kembali kepada anggota Info Kebencanaan yang aktif dilapangan agar memudahkan dalam berkomunikasi.

"Kita berikan radio ini kepada anggota dilapangan. Kita semua di grup ini transparan, biar semua anggota mendapatkan tapi tunggu gilirannya," jelasnya.

Ruslan berharap di musim kemarau ini bencana tidak terjadi di Kota Balikpapan. Namun demikian, jika ujian dan cobaan tersebut terjadi di Kota Balikpapan, ia siap melaporkan kejadian tersebut kapan pun dan di manapun.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



POLRES PASER BONGKAR JARINGAN PENGEDAR SABU DI LONG IKIS

MEDIASI TUNTUTAN KARYAWAN PT SUK BELUM ADA TITIK TERANG





Tersangka dan barang bukti

POLRES PASER BONGKAR JARINGAN PENGEDAR SABU DI LONG IKIS

PASER - Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Paser kembali membongkar jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Long Ikis.

Dari serangkaian operasi penyergapan, petugas meringkus dua tersangka pelaku masing-masing berinisial AT (39) dan AR (31). Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai maraknya transaksi narkoba di wilayah Long Ikis akhir-akhir ini.

Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi kemudian menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan yang dibantu anggota Polsek Long Ikis. "Atas informasi itu anggota melakukan penyelidikan" kata Suradi, Sabtu (21/10/2023).

Selanjutnya, petugas mendapati seorang pria yang belakangan diketahui berinisial AT di Desa Tajer Mulya, Kecamatan

Longikis pada Kamis (19/10/2023). Saat itu, AT menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, sehingga petugas berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan.

Namun saat dihampiri, AT justru tampak sedang membuang benda yang ternyata berupa satu buah kotak lem dan dompet. Ketika diperiksa, petugas mendapati 1 plastik klip berisi sabu dari dalam kotak lem serta 5 plastik klip berisi sabu di dalam dompet.

"AT sempat membuang barang bukti satu buah kotak lem dan dompet yang berisikan paketan sabu," tukas Kasatresnarkoba.

Pasca melakukan interogasi terhadap AT, penyidik mendapat informasi bahwa barang bukti yang ditemukan bersumber dari AR. Petugas gabungan langsung bergerak memburunya.

AR terlacak sedang berada di rumahnya di desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara. Petugas lantas menyergap AR hingga menemu-

kan sejumlah barang bukti sabu usai pengeledahan.

"Tersangka pelaku terbukti menyimpan paket sabu sebanyak 23 paket yang disimpan di dalam tas selempang sebanyak 10 paket dan di dalam kotak sebanyak 13 paket," terang Suradi.

Dari rangkaian pengungkapan kasus, polisi berhasil menyita 67,88 gram sabu sabu siap edar dan uang tunai Rp13 juta yang diduga hasil transaksi gelap narkoba. "Anggota membawa AT dan AR beserta barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut ke Polres untuk diproses hukum lebih lanjut," tegasnya.

Atas kasus ini, AT dan AR sementara dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Apabila terbukti, AT dan AR bisa dikenakan hukuman pidana kurungan penjara selama 10 tahun.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Mediasi di DPRD Kabupaten Paser

MEDIASI TUNTUTAN KARYAWAN PT SUK BELUM ADA TITIK TERANG

PASER - Karyawan PT Samindo Utama Kaltim (SUK) asal Kecamatan Tanah Grogot mengeluhkan atas kebijakan perusahaan yang berencana merelokasi karyawan untuk tinggal di Kecamatan Batu Sopang.

Dampaknya, karyawan yang terlanjur tinggal di Kecamatan Tanah Grogot tak lagi disediakan fasilitas bus penjemputan seperti biasanya dari KM 10, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot.

Persoalan itu hingga sampai saat ini belum ada penyelesaian, dengan demikian sampai kepada mediasi yang dilakukan oleh DPRD Paser, setelah menerima surat dari Serikat Pekerja Sejahtera Paser (SPSP) pada Jum'at 20 Oktober 2023 lalu.

Wakil Ketua I DPRD Paser, Abdullah, mengatakan, persoalan itu sudah diketahui pada minggu lalu, upaya lebih dahulu dilakukan dengan menghubungi direktur perusahaan PT SUK, namun persoalan belum ada penyelesaian.

PT SUK dinilai terlalu saklek untuk bisa mengakomodir keinginan karyawan. Padahal, perusahaan lain tidak pernah ada masalah dalam urusan penjemputan karyawan.

"Mereka beralasan bahwa itu sudah kepu-

tusan perusahaan, jadi nanti kami bakal mengundang PT Kideco (induk perusahaan)," kata Abdullah, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SPSP bersama sejumlah karyawan PT SUK. Senin (23/10/2023).

Salah seorang karyawan PT SUK, Sir Jhon, mengatakan, bahwa sebelumnya sudah disepakati untuk lokasi penjemputan dari Kecamatan Tanah Grogot. Namun, pihak perusahaan tiba-tiba menerbitkan surat soal penjemputan langsung dari Kecamatan Batu Kajang.

"Penjemputan itu tidak disepakati, hanya dilakukan secara sepihak," katanya.

Direktur PT SUK, Siswanto, mengatakan, kebijakan itu dilakukan dengan maksud keamanan dan keselamatan kerja. Karyawan yang tinggal di Kecamatan Tanah Grogot direncanakan untuk direlokasi ke Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang dengan mes yang disediakan.

"Saat ini kami berharap agar karyawan bisa dipindahkan ke Batu Kajang, karena induk perusahaan PT Kideco konsen akan keamanan dan keselamatan pekerja," kata Siswanto.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SELASA
24 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



KALLAND PROJECT GELAR BATEEQ NOESANTARA, ADA TALKSHOW HINGGA FASHION SHOW





Kegiatan Bateeq Noesantara di Hotel Aston Samarinda

KALLAND PROJECT GELAR BATEEQ NOESANTARA, ADA TALKSHOW HINGGA FASHION SHOW

SAMARINDA - Kalland Project, sebuah Komunitas Faskriya (Fashion & Kriya) asal Samarinda, bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Samarinda, serta Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda menggelar event Bateeq Noesantara. Event ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20-22 Oktober 2023 di Hotel Aston Samarinda.

Tujuan pelaksanaan event ini yaitu, melestarikan batik dan mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia', menciptakan ekosistem dan embrio baru industri fashion, serta membuka peluang pasar bagi para desainer lokal Samarinda untuk menembus industri nasional.

Adapun rangkaian acara Bateeq Nusantara yaitu, Fashion Workshop, Beauty Class, Fashion Craft & Culinary Expo, Talkshow, hingga Fashion Show.

Dalam sesi Talkshow dengan tajuk Sustainable Fashion, menghadirkan fashion designer sebagai narasumber, yaitu Meinnisa Wiyandari dan Emelda Andayani.

Meinnisa Wiyandari yang akrab disapa Mei, menuturkan bahwa industri fast fashion menimbulkan permasalahan di hilirnya, yaitu limbah dan sampah pakaian yang sudah tidak terpakai.

Sehingga, menurut Mei untuk mengantisipasi penambahan sampah akibat fast fashion, yaitu menjadi konsumen yang bijak, mulai dari memilih pakaian yang timeless, kreatif dalam memadupadankan item pakaian, serta berhati-hati dalam memilih bahan pakaian.

Berdasarkan data, terdapat 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Sedangkan untuk pakaian

berbahan polyester membutuhkan waktu 10-40 tahun untuk mengurai.

"Masalah zaman sekarang yaitu membeli baju karena dirasa lucu. Ini berkontribusi terhadap penambahan sampah fast fashion. Selain itu terjadi eksploitasi tenaga kerja akibat industri fast fashion ini. Maka, jadilah konsumen yang bijak dalam memilih produk yang akan digunakan," ujar Mei

Selain itu, Emelda Andayani menambahkan bahwa konsumen dapat menggunakan konsep 'reuse' dan berkreasi dengan item fashion agar menjadi berbagai macam 'look', dan untuk produsen diharapkan agar menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

"Sebagai pegiat fashion, kita harus peduli dengan lingkungan. Salah satunya memilih bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan konsep reuse, tidak harus pakaian baru untuk tampil menarik," ujar Emelda

Sementara itu, Founder Kalland Project, Anas Maghfur, mengungkapkan bahwa anggota dari Kalland Project mencapai 80 orang, yang terdiri dari desainer, pelaku industri kriya, dan fashion enthusiast.

Anas berharap agar ke depannya seluruh pihak terkait untuk mendukung ekosistem fashion di Samarinda untuk dapat berkembang.

"Saya berharap industri fashion di Kalimantan Timur dapat berkembang. Tetapi ini butuh kerjasama semua pihak. Sehingga di Kalland Project memberikan wadah bagi mereka yang peduli dengan pengembangan industri fashion," tutupnya.

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari



pangan lokal yang ada disekitar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atasi stunting.

PANGAN LOKAL DAPAT CEGAH GIZI BURUK

SAMARINDA- Hadapi ancaman gizi buruk bagi balita, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada masyarakat memberikan asupan pangan lokal.

Analisis Gizi Dinkes Kaltim, Uzah Maria Ulfah mengatakan demi terhindar dari gizi buruk pada anak maka asupan gizi harus seimbang. Dalam hal ini asupan pangan lokal dapat membantu kebutuhan tersebut.

Menggunakan asupan lokal, masyarakat dapat memanfaatkan beragam pangan yang ada di sekitar seperti telur, ikan-ikan, dan sayuran lainnya.

“Untuk pemenuhan asupan gizi kepada balita yang mengala-

mi gizi buruk sebenarnya beragam, tergantung dari ketersediaan pangan di daerahnya, misal telur, ikan lele, ikan bawis, ikan kembung, ikan bandeng, ada juga umbut rotan dan beberapa macam sayuran,” jelas Maria, Senin (23/10/2023).

Untuk pemenuhan gizi tersebut yang terpenting adanya komposisi dan menu yang bervariasi.

“Yang pasti orang tua harus tahu menu apa saja yang disukai oleh anak, jangan sampai yang diberikan ke anak malah meropotkan nantinya atau anak tidak selera,” pungkasnya.

Pewarta : Ernita
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung.

GUNAKAN LOGO PEMPROV UNTUK KAMPANYE CAPRES DI TWITTER, BAWASLU KALTIM TELUSURI, KADIS KOMINFO SEBUT DICATUT

SAMARINDA - Eskalasi politik semakin meningkat setelah partai politik (parpol) menetapkan dan mendaftarkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Sosialisasi dan kampanye terus mengisi ruang-ruang publik, termasuk jagad media sosial yang kini penuh dengan narasi dukungan bagi caores dan cawapres.

Akun-akun pendukung pasangan capres dan cawapres juga mulai bermunculan di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya.

Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar, mengakui bahwa kampanye melalui platform daring saat ini menjadi panggung yang sangat rawan untuk penyulut provokasi hingga tindakan kekerasan.

Saat ini, Bawaslu bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk melakukan pelacakan terhadap akun-akun media sosial.

Teranyar, pihaknya telah mendapatkan informasi tentang adanya akun Twitter atas nama Kalimantan Timur yang menggunakan logo Pemprov Kaltim dalam memberikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kami masih melakukan penelusuran dan akan kami tanyakan kepada Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Red.) apakah ini merupakan akun resmi atau bukan. Karena jika ini adalah akun pemerintah, maka jelas merupakan pelanggaran," tegasnya.

Menurutnya, jika akun tersebut bukan merupakan akun resmi, maka pemiliknya telah mencatutnya. "Kami tentu akan melakukan pelacakan terhadap pemilik akun tersebut dan akan meminta klarifikasinya," ujarnya.

Galeh mengakui bahwa kampanye di media sosial rentan terhadap pencatutan nama dan provokasi. Bahkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu menun-

jukan bahwa salah satu modus yang dapat memicu politisasi berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) adalah penggunaan media sosial. "Ini harus menjadi perhatian bersama," tegas Galeh selaku komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kaltim.

"Kami juga akan melakukan pelacakan jika terjadi peristiwa terkait SARA di media sosial. Kami juga memiliki saluran pelaporan cepat untuk menindaklanjutinya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, HM Faisal, memastikan bahwa akun yang digunakan untuk kampanye capres dan cawapres bukan merupakan akun resmi Pemprov Kaltim. "Ya, akun tersebut mencatut logo Pemprov Kaltim," katanya. Dikatakan, pihaknya telah mengirim pesan langsung (Direct Message) di akun Twitter tersebut, namun belum mendapatkan respons. (MK)



SIMPAN SABU 1,62 GRAM, WARGA BALIKPAPAN BARAT DITANGKAP POLISI DI SAMARINDA

SAMARINDA - Satuan Narkoba Polresta Samarinda kembali menangkap tersangka pengedar narkoba di kota Samarinda.

Polisi menangkap seorang pria berinisial PA (30) Warga kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka, Polisi menemukan 4 paket sabu dalam plastik bening dengan total seberat 1,62 gram bruto, selain itu juga diamankan satu buah handphone dan satu unit motor milik tersangka.

"Tersangka PA ini kami tangkap di Jalan

Gatot Subroto, Sungai Pinang

Kota Samarinda, pada Kamis (19/10/2023) lalu sekitar pukul 15.00 Wita. Sabu yang kita amankan totalnya 1,62 gram," ujar Kasat Res-narkoba Kopol Bambang.

Setelah dilakukan pengembangan, PA mengaku mendapatkan sabu tersebut dari FA (36) warga Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

"Jadi tersangka PA ini mendapatkan sabu dari FA, setelah mendapatkan informasi pengakuan tersebut, tim kami langsung berangkat untuk mengamankan FA," pungkas Kopol Bambang. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi III DPRD Kaltim

STUDI KELAYAKAN FLY OVER MT HARYONO - TEUKU UMAR DIANGGARKAN TAHUN 2024

SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran untuk membangun flyover atau jalan layang yang menghubungkan Jalan MT Haryono dan Jalan Teuku Umar Samarinda telah diakomodir di APBD 2024.

Termasuk juga usulan anggaran untuk feasibility study (studi kelayakan) juga akan dilaksanakan pada tahun depan.

"Sudah ada penganggaran untuk studi kelayakan dan itu memang belum termasuk anggaran pembangunan fisiknya," jelas Politisi PDI Perjuangan ini, Senin (23/10/2023).

Ia menerangkan bahwa studi kelayakan, dilaksanakan terlebih dahulu untuk menimbang dampak dari rencana pembangunan sebuah proyek. Bila studi kelayakan tersebut telah ada, barulah proses penganggaran pekerjaan fisik fly over tersebut dilakukan.

"Kalau tahapan studi kelayakan dan DED sudah ada, baru dilakukan penganggaran untuk pembangunan fisiknya," terangnya.

Pembangunan fly over MT Haryono - Teuku Umar sendiri mengemuka pada tahun 2023 ini. Diproyeksikan pembangunan jembatan layang ini untuk mencegah kecelakaan yang acap kali terjadi di jalan tersebut.

Selain itu, jembatan layang ini juga dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi diperempatan tersebut khususnya di jam-jam tertentu yang padat kendaraan.

"Ini untuk memecah kepadatan lalu lintas, khususnya di simpang empat Jalan Teuku Umar dan Jalan MT Haryono yang juga menghubungkan pengendara ke Jalan M Said dan Jalan Tengkawang," pungkasnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono

JADI PINTU GERBANG KALTIM, SAPTO DORONG PENINGKATAN LAYANAN BANDARA SEPINGGAN

SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, mendorong peningkatan layanan di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan ditingkatkan. Hal ini harus dilakukan di mana kehadiran Ibu Kota Negara (IKN), sarana dan prasarana transportasi harus menjadi perhatian.

Menurutnya, sebagai bandara yang dengan klasifikasinya internasional, Bandara Sepinggan harus terus mengalami pengembangan. Apalagi, bandara yang terletak di Balikpapan itu merupakan salah satu pintu masuk Kaltim, dan menjadi penghubung ke Nusantara.

“Bandara itu adalah pintu masuk Kaltim. Artinya dengan adanya IKN, meski ada bandara VIP khusus, na-

mun penumpang domestik tetap di Sepinggan,” jelas Sapto kepada awak media.

Politisi Golkar ini menerangkan, dengan kehadiran IKN di Bumi Etam, mobilisasi masyarakat dari dan menuju Kaltim terus meningkat. Sarana dan prasarana transportasi udara di Kaltim harus terus ditingkatkan oleh pihak terkait khususnya pengelola bandara.

“Artinya bandara harus jadi yang terbaik, bagaimana mau masuk ke IKN kalau bandara kita tidak diolah dengan yang terbaik. Sangat bagus pastinya,” tutupnya. (Eky/Adv/DPRD-Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono

MASYARAKAT DIIMBAU JANGAN MUDAH TERGIUR PINJOL DAN INVESTASI BODONG

SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mengimbau masyarakat Kaltim tidak tergiur dengan pinjaman online (pinjol) dan investasi yang bodong yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, dewasa ini dengan sistem online sangat mudah untuk melakukan pinjaman atau investasi. Namun kerap kali masyarakat tidak melakukan hitung-hitungan dari segi pendapatan sehingga menjadi korban dan terlilit hutang.

Untuk itu, ia meminta mas-

asyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran yang memberikan kemudahan dan kecepatan pencairan dalam pinjaman.

“Jangan tergiur dengan kemudahan dan kecepatan pencairan dana pinjol, karena bisa jadi kebiasaan buruk. Kita juga harus memperhatikan berapa pendapatan,” tegasnya kepada media ini.

“Salah satu indikator investasi bodong yaitu modal kecil, tapi hasilnya besar dan waktunya singkat,” sambungnya.

Sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan menurut

Politisi Golkar ini. Ia pun mengaku, bahwa DPRD Kaltim terus melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum.

“Kami juga berkoordinasi dengan OJK daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pinjol dan investasi bodong. Kami harap masyarakat tidak mudah tertipu dan melaporkan jika ada yang mencurigakan,” bebernya. (Eky/adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Kunjungan Pansus DPRD Kutai Kartanegara ke DPRD Provinsi Kaltim

DPRD KALTIM TERIMA KUNJUNGAN RAKER PANSUS DPRD KUKAR

SAMARINDA – Mewakili pimpinan, S. Roy Hendrayato selaku Tenaga Ahli Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Pansus Raperda DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (23/23).

Bertempat di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, kunjungan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu Pansus Raperda DPRD Kukar menyambangi DPRD Kaltim agar mendapatkan masukan dalam perancangan Raperda yang dimaksud.

“Pada prinsipnya, kami tenaga ahli dari Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mewakili Ketua Pansus dan anggota yang

mana dalam hal ini keadaan Reses. Kami menerima baik pertanyaan apapun yang dapat kami jawab terutama dalam proses pembuatan Perda tersebut mulai dari nol sampai akhir mendapatkan nomer daerah,” ucap Roy sapaan akrabnya.

Selanjutnya ia mengharapkan terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dalam membuat inisiatif Perda Pendidikan Penyelenggara Pancasila juga dapat diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota di Kaltim. Terlebih melihat kondisi saat ini, pemahaman mengenai Pancasila mulai mengendor di kalangan generasi muda.

“Kami monitoring, mudah-mudahan seluruh daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan Perda ini sedemikian rupa, untuk kepentingan menumbuhkan kembangkan kembali Pancasila”, tutupnya berpesan.

Selaras dengan itu, Ketua Pansus DPRD Kabupaten

Kutai Kartanegara Betaria Magdalena pun mengakui seandainya perancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh DPRD Kukar, pihaknya siap melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kami ingin lebih cepat untuk menjadikan ini sebuah Peraturan Daerah. Jika redaksi dan muatannya sudah sesuai, kami ingin segera disahkan dan setelah itu akan segera kami sosialisasikan supaya masyarakat paham dan tau pentingnya Pancasila,” ujar Betaria menjelaskan.

Semangat tersebut bukan tanpa alasan, hal itu lantaran Betaria dan anggota DPRD Kukar lainnya menginginkan generasi muda penerus bangsa memiliki moral dan etika sesuai nilai-nilai Pancasila. Meski di tengah maju dan lajunya perkembangan teknologi saat ini. (Adv/dprdkaltim)

Pewartu : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim Marthinus

JELANG PESTA DEMOKRASI, MARTHINUS MINTA MASYARAKAT SARING BERITA HOAKS

SAMARINDA - Tinggal hitungan bulan lagi, pemilihan Pemilu 2024 akan berlangsung. Pemberitaan dari media konvensional, dan media sosial terus menghujani masyarakat.

Mengingat hal ini, Anggota DPRD Kaltim Marthinus mengimbau masyarakat menyaring informasi dan memilih sumber berita yang valid dan terpercaya. Agar, masyarakat dapat terhindar dari berita atau informasi hoaks.

"Momentum tahun politik, informasi hoaks itu pasti akan

bermunculan, masyarakat harus cerdas dengan hal semacam itu," ucapnya, Senin (23/10/2023).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, berita hoaks dapat memicu masyarakat untuk terpecah belah. Sehingga kondusivitas sebelum dan setelah Pemilu 2024 dapat terganggu.

"Hoaks ini mampu menciptakan perpecahan sesama kelompok atau golongan lainnya," tegasnya.

Untuk itu edukasi kepada masyarakat, ujar Legislator

Dapil Kubar-Mahulu ini, harus terus digalakan ditengah masyarakat. Selain itu lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan filterisasi berita dan informasi diminta lebih sigap melakukan antisipasi penyebaran hoaks.

"Kita harus cerdas dalam mendalami informasi yang didengar, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain," pungkasnya. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL

OK!
TOBER

Deluxe Room

ONLY

~~Rp 698.000,-~~

30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Mini Mantou
5 pcs



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com